

KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA (SUATU TINJAUAN SOSIOLOGIS TERHADAP PROSES DISINTEGRASI ELIT POLITIK DI ERA REFORMASI)

Arundina Dajah Retno Pratiwi

Artikel ini menyajikan tinjauan sosiologis tentang konflik sosial secara horizontal yang marak terjadi di kalangan elit politik Indonesia akhir-akhir ini. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa konsep masyarakat yang selama ini dianggap harmonis tengah menghadapi tantangan disintegrasi bangsa (perpecahan bangsa). Penulis beranggapan bahwa akumulasi kesenjangan sosial-budaya serta polemik atas "konsep reformasi" menjadi pemicu dasar terjadinya konflik sosial tersebut, yang selanjutnya menggambarkan suatu fenomena dimana masyarakat Indonesia cenderung "keluar" dari akar budayanya.

Pendahuluan

Konflik sosial merupakan suatu realitas sosial yang senantiasa kita temukan dalam proses kehidupan sosial sehari-hari. Keberadaannya tidak terlepas dari fenomena bahwa tujuan hidup setiap individu atau kelompok berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan tujuan tersebut selanjutnya menghadirkan sejumlah strategi, yang juga berbeda-beda, untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan, dan tak jarang strategi masing-masing orang atau kelompok saling bersinggungan dan selanjutnya saling berbenturan satu sama lain. Benturan sosial itu dapat menimbulkan konflik sosial, baik secara vertical maupun horizontal, apabila masing-masing pihak yang berseteru enggan untuk mencapai satu kesepakatan (konsensus) untuk menghindari terjadinya konflik dimaksud.

Kondisi aktual pada masyarakat Indonesia, maraknya konflik sosial yang terjadi, merupakan suatu contoh konkrit terjadinya benturan sosial antar individu, atau

antar kelompok, bahkan antar individu yang berakhir dengan benturan antar kelompok. Hal tersebut dipicu oleh beberapa hal, antara lain: kesenjangan sosial-ekonomi yang telah terakumulasi dalam kurun waktu cukup lama, serta media "reformasi" yang dianggap oleh sebagian besar anggota masyarakat kita sebagai cara untuk meleagalkan dan mewujudkan tujuan pribadi (atau kelompok) di atas kepentingan umum.

Kesenjangan sosial-ekonomi tersebut, di satu sisi, dirasakan telah bersifat kronis dan akumulatif, yang juga kerap kali dikemas dan tersamar oleh faktor-faktor kesukubangsaan, agama, ekonomis, dan politis. Akar penyebab kesenjangan sosial-ekonomi adalah adanya perbedaan akses terhadap sumber-sumber daya ekonomis sebagai hasil rekayasa sosial-politis pada masa pemerintahan rezim Orde Baru. "Bendera reformasi" yang telah diaktakan sejak pertengahan tahun 1997, di sisi lain, telah mampu menjungkir-balikan kondisi sosial-ekonomis bangsa yang

dirasakan masih berdampak hingga saat ini. Parahnya, sebagian besar anggota masyarakat beranggapan bahwa "reformasi" merupakan suatu media penting untuk mewujudkan obsesi diri bahkan kelompoknya, sehingga tak jarang kita temukan sejumlah pelanggaran ketentuan hukum dengan dalih untuk mewujudkan "cita-cita reformasi".

Berdasarkan pemikiran di atas, dapat kita ketahui bahwa konflik sosial yang terjadi akhir-akhir ini merupakan suatu "protes sosial" terhadap kesenjangan sosial-ekonomi yang telah terakumulasi selama kurang lebih 30 tahun (pada masa Orde Baru), dan menimbulkan ketidakpuasan serta perasaan frustrasi pada diri individu atau kelompok-kelompok sosial tertentu, di antaranya konflik sosial horizontal yang terjadi antar elit politik. Konflik sosial tersebut, lambat-laun dapat memberikan kontribusi terhadap rusaknya "tatanan sosial" yang terdapat dalam masyarakat kita. Konsep "Bhinneka Tunggal Ika" yang kita agungkan selama ini, kini dikhawatirkan hanya merupakan kenangan saja. Proses rusaknya tatanan sosial tersebut, pada hakekatnya membawa kita pada suatu perumusan konsep masyarakat ideal di masa yang akan datang. Namun seberapa jauh konsep "Indonesia Baru" mampu mengakomodasi permasalahan saat ini, hal ini masih menjadi polemik tersendiri, mengingat konsep tersebut pun masih diwarnai sejumlah konflik di kalangan kelompok elit pemerintahan tersebut.

Saat ini, dalam rangka membangun masyarakat "Orde Reformasi" atau "Indonesia Baru", atau konsep-konsep lain yang diajukan para ahli, maka kiranya perlu dilakukan "cooling down process" (proses pendinginan) secara menyeluruh bagi seluruh anggota bangsa Indonesia (meliputi semua

kalangan), khususnya kalangan elit politik, agar mereka mampu mengintrospeksi diri serta pada akhirnya mampu menghadirkan kembali "suasana kehidupan harmonis" yang pernah kita alami bersama. Tidak ada salahnya apabila kita mengacu pada agenda sejarah yang mencatat kejayaan bangsa kita di masa lalu, di antaranya kejayaan Kerajaan Majapahit, yang mampu mempersatukan nusantara dalam satu genggaman konsep masyarakat majemuk yang selaras dan seimbang.

Konflik Sosial: Suatu Tinjauan Sosiologis

Kajian sosiologis tentang masyarakat pada intinya berpusat pada analisis tentang interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Konsep interaksi sosial dapat diartikan sebagai hubungan antar warga dan lembaga masyarakat sehingga terjadi dinamika kehidupan masyarakat yang membentuk pola hubungan. Interaksi sosial, pada intinya, merupakan kekuatan inti yang membentuk kehidupan sosial, karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama (syarat utama terjadinya aktivitas sosial).

1. Proses interaksi sosial pada dasarnya dipengaruhi oleh beberapa faktor (Soekanto, 1999: hal. 69-71), antara lain:
2. Faktor imitasi: dengan tujuan dasar "untuk mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku". Berdasarkan faktor ini, seseorang akan melakukan suatu interaksi sosial sesuai dengan contoh yang ia ketahui dan pahami. Apabila kita menemukan seseorang melakukan sesuatu yang melanggar aturan sosial yang ada, maka sesungguhnya hal tersebut merupakan akibat adanya penyimpangan

aturan sosial di dalam masyarakat, dan generasi penerus mewarisi nilai-nilai negatif tersebut pada akhirnya.

3. Faktor sugesti: yakni faktor yang berlangsung "apabila seseorang memberi suatu pandangan atau sesuatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain". Faktor kedua ini berkenaan erat dengan konsep "pengaruh" yang mampu dihadirkan oleh seseorang atau sekelompok orang. Dalam kondisi tertentu seringkali kita dihadapkan pada suatu kondisi dimana kita tak dapat memaksakan persepsi atau kehendak kita pada orang lain, hingga pada akhirnya kita harus tunduk pada persepsi atau kehendak orang lain. Demikian juga sebaliknya, kita dapat memaksakan persepsi serta kehendak kita kepada orang lain, sepanjang kita mampu mempengaruhi serta meyakinkan orang lain tentang posisi kita.
4. Faktor identifikasi: yang berwujud "kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain". Proses identifikasi dapat berlangsung secara tidak sadar, maupun secara sengaja oleh karena seringkali seseorang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu di dalam proses kehidupannya. Proses tersebut dalam kenyataannya tidak hanya meliputi hal-hal yang bersifat positif, karena tidak menutup kemungkinan hal yang bersifat negatif yang dijadikan sebagai faktor identifikasi bagi perilaku seseorang atau sekelompok orang.
5. Faktor simpati: yakni suatu "proses dimana seseorang merasa tertarik pada pihak lain". Faktor ketertarikan terhadap sikap atau perilaku orang atau kelompok

tertentu mampu berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang, hingga tidak menutup kemungkinan seorang anggota masyarakat tertarik untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang lain.

Hal-hal tersebut di atas merupakan faktor-faktor yang menjadi dasar bagi berlangsungnya proses interaksi sosial, walaupun dalam kenyataannya proses tersebut cenderung bersifat kompleks, sehingga kadang-kadang sulit untuk membedakan secara tegas batas di antara faktor-faktor tersebut.

Apabila dihubungkan dengan kondisi aktual dalam masyarakat kita, dapat kita amati dan analisis bahwa memang pada kenyataannya keempat faktor interaksi sosial di atas dapat kita temukan dalam proses kehidupan politik. Dalam hidup, kita mengenal dan melakukan proses imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati yang kita warisi secara kultural dari para orangtua dan juga lingkungan masyarakat tempat kita tinggal. Proses tersebut setelah mampu memunculkan identitas perseorangan, selanjutnya menghasilkan identitas komunal (identitas bersama atau kelompok) yang didukung oleh sekelompok orang tertentu yang merasa mendukung suatu pola budaya yang sama. Kesamaan pola budaya tersebut, yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, melahirkan suatu konsep yang kita kenal dengan istilah "kesadaran kelompok" ('in-group consciousness'): suatu konsep yang telah akrab dengan bangsa kita sebagai suatu masyarakat majemuk, dimana kesadaran tersebut menjadi landasan yang cukup penting untuk menjaga keutuhan kelompok. Dalam hal ini para elit politik

yang tergabung dalam suatu kelompok tertentu, apakah sebagai anggota lembaga legislatif, eksekutif atau yudikatif, memiliki kesadaran kelompok tersebut. Kesadaran kelompok yang mereka miliki erat kaitannya dengan peran serta tugas yang harus mereka mainkan.

Dalam realitas sosial sehari-hari maupun dalam kehidupan politik, kita senantiasa melakukan interaksi sosial, baik antar individu, individu dengan kelompok, maupun antar kelompok. Interaksi sosial tersebut merupakan inti dari proses sosial, dimana segala aspek kehidupan sosial disampaikan dan dikomunikasikan melalui suatu interaksi sosial. Soekanto (1999: hal. 76) berpendapat bahwa interaksi sosial dapat terwujud dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu:

1. Kerjasama (*cooperation*).
Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang ditentukan oleh pola orientasi perorangan terhadap kelompoknya (*in-group*) dan kelompok lain (*out-group*). Interaksi sosial ini mengacu pada adanya keseimbangan (*equilibrium*) dalam interaksi antar orang-perorangan dan kelompok yang dilandasi oleh perekat sosial yang berupa norma sosial.
2. Persaingan (*competition*).
Persaingan dapat berupa persaingan materiil, kedudukan, kebudayaan, maupun bersifat primordial. Persaingan antara lain berfungsi bagi: aktualisasi keinginan, model seleksi sosial, penataan pola kerja. Adapun dampak dari persaingan antara lain dapat berupa: perubahan kepribadian, kemajuan, solidaritas kelompok, dan disorganisasi.
3. Pertentangan (*conflict*).
Pertentangan dan pertikaian merupakan suatu proses sosial yang terjadi atas

interaksi sosial untuk mencapai tujuan dengan melakukan ancaman dan kekerasan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan antar individu, kebudayaan, kepentingan, dan lain-lain. Alasan terjadinya pertentangan dapat berupa alasan pribadi, massal, antar kelas sosial, politik, lokal, internasional, rasial, dan lain-lain.

Pertentangan atau yang kerap disebut "konflik", sebagai suatu realitas sosial, merupakan suatu fenomena yang dapat kita temukan dalam proses kehidupan bermasyarakat. Hagedorn (1990: 14-15) mengemukakan bahwa keberadaan konflik dalam masyarakat berkenaan dengan beberapa aspek berikut ini:

1. Masyarakat selalu berubah.
Aspek ini berkenaan dengan kenyataan bahwa masyarakat bersifat dinamis, sehingga dapat dikatakan bahwa masyarakat tidaklah senantiasa statis. Perubahan masyarakat dapat kita rasakan dan amati apabila kita lakukan perbandingan antara kondisi masyarakat di masa lalu dengan kondisi di masa kini. Masyarakat Indonesia sebagai suatu masyarakat yang dinamis, juga mengalami perubahan dari masa ke masa, dan perubahan yang terakhir yang dapat kita saksikan adalah perubahan dalam kegiatan pemerintahan yang selanjutnya berdampak pada tatanan sosial bangsa Indonesia secara keseluruhan. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa peran lembaga legislatif yang sebelumnya senantiasa dikalahkan oleh arogansi lembaga eksekutif, kini harus membuktikan kinerjanya secara

optimal dalam merealisasikan tuntutan publik.

2. *Konflik dan ketidaksepakatan selalu ada dalam setiap sistem sosial.*

Dalam kehidupan bermasyarakat, kita senantiasa akan dapat menemukan perbedaan di antara para warganya. Perbedaan secara individual maupun kelompok menyebabkan timbulnya ketidaksepakatan di antara mereka, yang selanjutnya dapat berwujud suatu konflik yang cukup serius. Perbedaan tersebut pada dasarnya dipicu oleh perbedaan pola pikir dan tujuan hidup. Johnson (1990: 161) mengatakan bahwa "tidak ada suatu sistem sosial/masyarakat yang terintegrasi secara sempurna". Selalu ada kemungkinan ketidaksesuaian dalam prioritas yang diberikan pada nilai-nilai yang berbeda. Interpretasi yang saling bertentangan mengenai nilai-nilai bersama apabila diterapkan pada situasi tertentu, konflik peran, motivasi ambivalen atau negatif, ketegangan antara kebutuhan individu dan peran yang ditentukan secara budaya, serta ketidak konsistenan harapan individu satu sama lain. Hal ini pun dapat kita temukan dalam interaksi sosial yang terjadi secara horizontal antar kelompok elit politik di negara kita.

Apabila konsep yang dikemukakan oleh Johnson kita refleksikan dalam kehidupan berpolitik di Indonesia, maka kita dapat menemukan bahwa elit politik senantiasa mempunyai potensi konflik sepanjang perjalanannya. Banyak pihak beranggapan bahwa masa pemerintah Orde Baru seakan tanpa

konflik, padahal sesungguhnya konflik tersebut senantiasa ada hanya pemerintah pada masa itu memilih untuk melakukan tindakan represif terhadap sumber konflik. Hal tersebut pada perkembangan masyarakat kita selanjutnya dapat disetarakan dengan "konflik semu", karena kita tidak melihat konflik-konflik tersebut bermunculan ke permukaan seperti yang terjadi saat ini. Mekanisme 'konflik semu' tersebut selanjutnya terakumulasi dalam jangka waktu yang cukup lama, yang selanjutnya "meledak" pada saat konsep reformasi digulirkan. Konflik sebagai akibat kesenjangan sosial-budaya dalam hal ini perbedaan kepentingan politis seakan tak dapat terbendung dan pecah di semua penjuru Indonesia dalam waktu yang hampir bersamaan.

3. *Ada sub sistem-sub sistem yang menyebabkan perubahan.*

Apa yang tengah dialami oleh sebagian besar masyarakat dunia saat ini adalah adanya sejumlah perubahan sosial yang disebabkan karena adanya sub sistem-sub sistem yang memang menyebabkan perubahan secara keseluruhan dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat kita diawali dengan krisis ekonomi (yang termasuk dalam sub sistem ekonomi), hingga masyarakat kita cukup porak poranda untuk menghadapinya, hingga berlanjut pada krisis multidimensional (di antaranya mempengaruhi aspek politis) yang dapat kita temukan saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu sistem sosial kita dapat menemukan bahwa suatu sub sistem dapat menjadi faktor penentu bagi terjadinya perubahan.

4. *Unsur paksaan selalu ada dalam masyarakat*, dimana dalam setiap masyarakat selalu terdapat sekelompok orang yang mempunyai kekuasaan lebih jika dibandingkan dengan orang lain atau kelompok lain. Aspek keempat ini berkenaan dengan kesenjangan antara kelompok elit pemerintahan dan massa (rakyat), dimana kelompok elit merupakan kelompok yang cenderung menerapkan "unsur paksaan" terhadap massa dalam suatu proses pemerintahan. Pada kenyataannya unsur paksaan bukan hanya terjadi antar kelompok elit politik dengan massa, namun juga antar elit politik itu sendiri. Unsur paksaan dapat terjadi dari lembaga sosial yang berbeda maupun antar anggota lembaga sosial yang sama (lembaga sosial tersebut meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

Hal inipun dapat kita temukan dalam masyarakat Indonesia, dimana masing-masing kelompok elit politik yang satu merasa mempunyai dominasi atas kelompok elit politik yang lain dimana hal itu terlihat jelas dalam proses politis saat ini. Dominasi kelompok elit politik tersebut tak jarang juga didukung oleh sikap arogan (kesombongan) yang dimunculkan dalam melakukan tugas sehari-hari yang dapat pula diformulasikan demi keuntungan pihak elit politik tersebut untuk melakukan "pemaksaan kehendak" mereka.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa keempat aspek yang berkenaan dengan keberadaan konflik sosial secara horizontal dalam kelompok elit politik dapat juga kita

temukan dalam masyarakat kita. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan teori konflik dapat teruji di sini.

Konflik Sosial antar Elit Politik di Indonesia: Beberapa Contoh Kasus Aktual

Sejak dicanangkannya Orde Reformasi pada sekitar pertengahan tahun 1997, yang dibarengi dengan tumbangannya rezim Orde Baru, masyarakat kita senantiasa tidak pernah lepas dari himpitan masalah sosial-budaya yang kerap kali berakhir dengan konflik sosial. Apabila kita urut, maka konflik sosial telah terjadi sebelum dicituskannya reformasi, karena reformasi sendiri dapat dianggap sebagai titik kulminasi (semacam solusi) atas konflik sosial antara para mahasiswa dengan elit politik rezim Orde Baru.

Pada dasarnya konflik sosial tidak berakhir dengan berakhirnya dominasi Orde Baru, karena dalam realita politik saat ini konflik sosial juga marak terjadi di kalangan elit politik. Beberapa contoh kasus yang masih senantiasa aktual dihadirkan dalam pembahasan ini untuk memperjelas keberadaan konflik sosial tersebut pasca Orde Baru. Adapun contoh kasus tersebut meliputi:

1. *Arogansi lembaga legislatif atas lembaga eksekutif (Kasus Pemerintah Kota Surabaya).*

Kasus yang mencuat di Surabaya pada bulan Oktober 2002 dipicu oleh sikap arogansi pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surabaya dalam proses pengangkatan wali kota Bambang Dwi Hartono. Aspandi (Kompas, 14 Oktober 2002) mengatakan bahwa secara sepihak DPRD memutuskan untuk menonaktifkan wali kota karena dianggap cacat

hukum dalam proses legitimasinya. Hal itu menimbulkan konflik antara lembaga legislatif dan eksekutif yang cukup sulit untuk diatasi, karena memancing kekecewaan publik. Berdasarkan peristiwa tersebut timbul kesan bahwa lembaga legislatif bertindak secara lebih superior terhadap lembaga eksekutif hingga "kedahsyatan" kekuasaan legislatif mampu dibuktikan di sini.

2. *Arogansi lembaga legislatif atas lembaga yudikatif (Kasus Ketua DPR RI).*

Proses penyelesaian kasus Buloggate II yang terkait dengan keberadaan Ketua lembaga legislatif juga merupakan suatu kasus yang cukup menarik untuk kita telaah (<http://www.cps-sss.org/>). Penyelesaian kasus yang cenderung terkatung-katung hingga ketidakberdayaan lembaga yudikatif dalam menghadapi dominasi lembaga legislatif juga tercermin di sini. Ketua DPR RI Ir. Akbar Tanjung, yang notabene merupakan seorang tersangka, mampu "meloloskan diri" dari jerat hukum yang seharusnya ia terima. Fenomena ini semakin menguatkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga yudikatif yang seyogyanya menegakkan azas keadilan dalam menjatuhkan sanksi.

3. *Konflik antar pejabat eksekutif (Kasus Pemerintah Kota Bandung).*

Konflik horizontal antar elit politik tidak semata-mata terjadi secara lintas lembaga, namun dapat kita temukan pula konflik yang terjadi dalam suatu kelompok elit politik. Salah satu contoh

aktual yang cukup menarik untuk kita kaji adalah kasus pemecatan Sekretaris Kota (Sekota) Bandung H. Dada Rosada, SH., M.Si. oleh Wali Kota Bandung H. Aa Tarmana pada tanggal 26 Oktober 2002 (Sinar Harapan, 29 Oktober 2002). Publik melihat bahwa keputusan pemecatan tersebut merupakan titik kulminasi atas konflik yang terjadi antara Sekota dengan Wali Kota Bandung selama ini. Kasus ini jelas menunjukkan sikap arogan pihak penguasa daerah yang kurang bijak dalam menyikapi permasalahan internal organisasi.

4. *Arogansi lembaga yudikatif (Kasus Jaksa Agung).*

Kasus paling aktual yang berkenaan dengan arogansi lembaga yudikatif adalah kasus Jaksa Agung MA. Rachman yang dianggap melakukan kebohongan publik oleh pihak Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara. Hal ini menimbulkan polemik dalam masyarakat, karena MA. Rachman merupakan potret kebanyakan pejabat di Indonesia yang mempunyai kekayaan yang tidak sesuai dengan kemampuannya selaku aparat penegak hukum.

Keempat contoh kasus di atas menggambarkan kondisi negara kita yang senantiasa tak mampu mengatasi konflik horizontal antar elit politik dari masa ke masa, dengan permasalahan mendasar karena perbedaan kepentingan baik secara pribadi maupun kelompok. Semenjak kemunculan reformasi format kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) senantiasa bergulir dalam kelompok sosial yang kita namakan elit

politik yang selanjutnya melahirkan konflik horizontal di dalamnya. Suatu hal yang merupakan ironi bagi bangsa yang menjunjung tinggi azas kesatuan dan persatuan.

"Indonesia Baru": Polemik atas Suatu Konsep Ideal

Istilah "Indonesia Baru" merupakan suatu perwujudan atas konsep tatanan masyarakat Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru yang bertujuan untuk memberikan solusi atas keterpurukan masyarakat kita selama beberapa puluh tahun terakhir ini. Konsep 'Indonesia Baru' sendiri sebenarnya masih merupakan suatu konsep yang bersifat abstrak, dan para ahli pun masih terlihat kebingungan untuk mencari format bakunya. Istilah tersebut pun selanjutnya digunakan sebagai tajuk acara 'talk show' di televisi yang mencoba mengangkat isu-isu aktual yang sekiranya dapat membantu proses pemaknaan terhadap istilah dimaksud. Namun kembali, istilah 'Indonesia Baru' masih merupakan polemik tersendiri hingga saat ini. Polemik tersebut tidak hanya terbatas pada kalangan ilmuwan saja, namun juga terlihat di kalangan elit pemerintahan yang akhir-akhir ini diwarnai dengan konflik di antara para elit, misalnya konflik antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Pada dasarnya istilah 'Indonesia Baru' dapat kita anggap sebagai suatu konsep yang mungkin cukup ideal untuk diterapkan dan diharapkan dapat memberikan pemecahan atas segala bentuk konflik yang terjadi saat ini. Konsep tersebut tentu saja bukan merupakan suatu pilihan mudah dimana kita dapat memilih suatu bentuk pemerintahan tertentu saja, namun lebih merupakan suatu

rumusan yang bersifat komprehensif dan dapat diaplikasikan terhadap pemecahan masalah secara multidimensional. Kita tidak hanya merumuskan strategi pemilihan presiden yang aspiratif saja, tetapi kita juga harus dapat merumuskan permasalahan bangsa ini secara terinci mencakup seluruh aspek sosial-budaya, sehingga adanya kecenderungan bahwa bangsa Indonesia akan tercabut dari akar budayanya dapat kita hindarkan. Memang bukan merupakan suatu tugas yang mudah, khususnya bagi pihak pemerintah yang harus menyelesaikan "pekerjaan rumahnya" secara cepat, di samping adanya tuntutan dari sebagian besar anggota masyarakat yang mengharapkan penyelesaian yang bersifat "instant". Tuntutan publik tersebut bersifat sangat sensitif dan sewaktu-waktu dapat berubah wujud dalam bentuk konflik sosial. Oleh karena itu, pihak pemerintah harus senantiasa "waspada" dan "sensitif" terhadap tuntutan publik dan berusaha untuk mewujudkannya di atas kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Persoalan yang dapat kita amati sekarang adalah adanya kecenderungan dari pihak pemerintah untuk memprioritaskan kehendak atau tuntutan pribadi atau kelompok di atas kepentingan nasional. Kita dapat menilai bahwa kecenderungan timbulnya sikap arogansi antar elit politik mengindikasikan suatu penempatan prioritas yang kurang tepat. Sangat disesalkan mengapa beliau tidak lebih mengkonsentrasikan kunjungannya ke daerah-daerah yang terlibat konflik sosial dan berusaha mencari aspirasi publik atas permasalahan tersebut, sehingga beliau dapat meramu suatu formula yang cukup ampuh untuk mengobati gejala-gejala disintegrasi bangsa.

Masalah utama yang timbul berkenaan dengan istilah 'Indonesia Baru', adalah masih samarnya makna yang terkandung dalam istilah tersebut. Konsep tersebut terasa kabur, mengingat kita saat memasuki era reformasi belum sepenuhnya siaga dengan segala kemungkinan yang akan kita hadapi pada masa-masa yang akan datang. Hal terpenting yang belum tersesuaikan hingga saat ini adalah masalah tatanan sosial-budaya yang "belum sempat dipersiapkan" saat kita mengalami proses "revolusi" pemerintahan yang telah "menghancurkan" tatanan sosial-budaya lama. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap reformasi terlihat gamang ketika ia harus bertanggung jawab terhadap segala bentuk persoalan yang lahir atas konsep yang mereka canangkan. Apabila kita tanyakan kepada para mahasiswa yang gigih memperjuangkan runtuhnya rezim Soeharto tentang strategi yang harus ditempuh oleh kelompok elit pemerintahan baru, maka apa yang akan mereka ungkapkan hanyalah merupakan hasil kajian teoritis di lingkungan kampus yang masih jauh dari unsur "uji coba kelayakan" dalam realitas nyata di lapangan. Para mahasiswa yang pada mulanya dianggap sebagai pahlawan di era modern ini, kini hanyalah merupakan aktor yang gemar memainkan lakonnya di jalanan, bahkan seringkali mengganggu aktivitas publik.

Masyarakat, di sisi lain, kini telah merasa jenuh dengan sejumlah janji yang dilontarkan para anggota elit pemerintahan, bahkan akhir-akhir ini mereka pun kerap menyaksikan fenomena konflik sosial di kalangan para elit seperti layaknya kita menyaksikan "dagelan" ketoprak humor yang tidak sepenuhnya mengundang tawa mereka. Apa yang dapat mereka tertawakan apabila

kondisi sosial-budaya masyarakat tak kunjung terangkat dari krisis multidimensional yang berkepanjangan. Masyarakat bukan merupakan bahan eksperimen, dimana apabila percobaan yang dilakukan mengalami kegagalan maka bahan-bahan bakunya dapat dimusnahkan. Kita jangan sampai "memusnahkan" masyarakat Indonesia yang telah lahir sejak ratusan tahun lalu dan telah mengalami gelombang pasang surut dalam proses dinamika perubahan jaman. Rasanya tak sampai hati apabila membiarkan masyarakat kita semakin tercabut dari akar budayanya, dimana kini kita dapat melihat bahwa budaya Timur yang santun dan dikenal mempunyai filosofi yang luhur, saat ini justru kita temukan tindakan-tindakan anarkis yang mudah tersulut oleh aspek egoisme pribadi atau kelompok.

Menanggapi kenyataan tersebut, pihak pemerintah seyogyanya segera melakukan perumusan terhadap konsep 'Indonesia Baru' hingga menjadi program kerja yang bersifat aplikatif dan sekaligus aspiratif, sehingga permasalahan sosial-budaya yang ada saat ini dapat sedikit demi sedikit teratasi. Konsep 'Indonesia Baru' tak perlu harus selalu kita adopsi dari budaya Barat, kita dapat memanfaatkan kajian sejarah yang menuturkan tentang keberadaan suatu masyarakat adil makmur di masa lalu, dan tidak mustahil kita dapat menemukan hikmah dibalik hikayat yang ada. Tentu saja kita pun dapat menggabungkan dengan konsep-konsep aktual yang sekiranya sejalan untuk kita rangkakan, atau kita dapat belajar dari pengalaman beberapa negara tetangga yang setidaknya mempunyai latar belakang sosial-budaya yang kurang lebih sama. Tak ada salahnya apabila kita menimba ilmu dari negara jiran terdekat, yakni Malaysia; atau

mengaca dari pengalaman negara Thailand dalam mengatasi krisis ekonomi yang juga mereka alami. Dalam hal ini yang diperlukan adalah "jiwa besar" untuk mengakui segala kekurangan serta kesalahan di masa lalu, dan mulai mendirikan kembali fondasi bangunan nasional yang kini sudah sangat rapuh.

Penutup: Reformulasi Agenda Reformasi

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa semua wilayah serta pada setiap lapisan sosial yang ada di Indonesia mengandung potensi konflik. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa konflik sosial-budaya terjadi di hampir seluruh wilayah dan lapisan sosial dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Guna menyelesaikan konflik tersebut, pihak pemerintah perlu melakukan reformulasi atas agenda reformasi yang ada saat ini, dengan memperhatikan beberapa usulan pemecahan sebagai berikut:

1. Kejelasan "peta pembangunan" pemerintah reformasi dengan mengagendakan aspirasi publik dalam perumusan strategi pembangunan nasionalnya. Hal ini perlu didukung secara profesional oleh kelompok elit politik, agar lembaga-lembaga sosial yang ada mampu menjalankan fungsi sebagaimana mestinya.
2. Penegakan supermasi hukum, tanpa pandang bulu, agar sanksi hukum dapat dikenakan pada semua pihak secara berkeadilan.
3. Perumusan "kesadaran nasional" akan keagungan konsep Bhinneka Tunggal Ika yang bukan hanya berupa slogan semata. Dalam hal ini pihak elit politik seharusnya merupakan contoh (*role model*) bagi masyarakat.

4. Meminimalisasi kesenjangan regional, yang mana berkenaan dengan penerapan Otonomi Daerah secara maksimal. Hal ini diharapkan mampu mengatasi konflik horizontal antar elit politik, baik di pusat maupun daerah.

Kepustakaan

- Aspandi, Ali. 2002. Awas, Kekuasaan Politik di Surabaya Terjebak pada Oligarki: Sebuah Refleksi nagi Anggota DPRD Surabaya. Kompas, 14 Oktober 2002.
- Centre for Political Studies-Soegeng Sarjadi Syndicated. 2002. Kasus Akbar Tanjung dalam Buloggate II. <http://www.cps-sss.org/> (Jakarta, 11 Maret 2002).
- Hagedorn, Robert. 1990. Sociology. Toronto: Holt, Rinehart and Winston of Canada, Ltd.
- Johnson, Doyle P. 1994. Teori Sosiologi Klasik dan Modern (Jilid 2). Jakarta: Gramedia.
- Sinar Harapan (29 Oktober 2002). Buntut Pemecatan Dada: DPRD Kota Bandung segera Panggil Tarmana.
- Soekanto, Soerjono. 1999. Sosiologi: Suatu Pengantar. Jakarta: Rajawali Pers.